

Psikologi Politik Hobbesian: Analisis Teoritis tentang Basis Antropologis Kontrak Sosial dalam *Leviathan* dan relevansinya

Bonar Hutapea

Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Abstract.

Among all scholars of social contract theory, Hobbes regarded as the first and the foremost thinker. The purpose of this paper is to reveal the anthropological base of his political thought. Reviving the classical understanding of the central place of his philosophical anthropology to politics, and the conception of humans he developed can help better understanding of political behavior even in the contemporary epoch. This paper argued that his political philosophy departs from a number of premises that are supposed to be self-evident, supplemented by various observations from experience which can be found in "Leviathan"; his famous and the most influential works of political philosophy ever written. Moreover, this paper also considered the relevancy of Hobbes' thought on several issues on psychological politics such as democracy, game theory, and bargaining in the social contract.

Keywords: *Philosophical anthropology; Social contract; Hobbes; Leviathan; Relevance*

Abstrak.

Di antara para filsuf kontrak sosial, Hobbes merupakan yang pertama dan terdepan. Tujuan artikel ini adalah mengungkap basis antropologis pemikiran politiknya. Dengan penyegaran kembali terhadap pemahaman klasik atas peran sentral antropologi filosofisnya dalam politik dan konsepsinya tentang manusia dapat membantu pemahaman terhadap perilaku politik bahkan dalam era kontemporer. Makalah ini menunjukkan bahwa filsafat politiknya berangkat dari sejumlah premis yang diandaikan terbukti dengan sendirinya dan beragam pengamatan melalui pengalamannya yang dapat ditemukan dalam "Leviathan" sebagai karya filsafat politik yang terkenal dan paling berpengaruh. Selanjutnya, makalah ini juga membahas relevansi pemikiran Hobbes ini terhadap sejumlah permasalahan dalam kajian psikologis politik seperti demokrasi, teori permainan, dan posisi tawar dalam kontrak sosial.

Kata Kunci: *Antropologi filosofis; Kontrak Sosial; Hobbes; Leviathan; Relevansi*

Korespondensi: Bonar Hutapea. Pengajar Psikologi Politik dan Psikologi Sosial pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta 10340 Telp +6221-3926000 ext. 9110-11 e-mail: bonarhup@yahoo.com

Para filsuf kontrak sosial dianggap mewakili suatu perubahan radikal dalam pemikiran politik pada zamannya. Filsuf-filsuf tersebut adalah Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau.

Tanpa mengabaikan signifikansi kontribusi kedua filsuf kontrak sosial lainnya, pemikiran politik Thomas Hobbes penulis anggap lebih menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Alasan utama penulis adalah karena Hobbes-lah yang pertama kali merumuskan kontrak sosial (Shaphiro, 1998). Alasan lain di antaranya adalah: seruannya, dalam *Leviathan*, tentang sebuah negara yang kuat dan logika politik yang diajukannya sebagai basis bagi doktrin absolutisme; filsafat egaliternya di mana semua manusia secara alami setara yang menyisakan pertanyaan perihal basis yang menjadi pijakan kesetaraan tersebut; gagasannya tentang "negara alam" yang dianggap sebagai eksperimentasi pemikiran tentang sebuah negara yang terpisahkan dari tatanan dan pembatasan sosial; pilihannya terhadap posisi monarkis sebagai resolusi terhadap ketegangan antara individu dengan komunitas dengan konsekuensi menerima bahwa kekuasaan brutal perlu dijalankan untuk menghadirkan stabilitas dan keamanan bagi kehidupan komunitas; keyakinannya atas "Hukum Alam" yang bagi banyak pakar sulit untuk tidak dibandingkan dengan tradisi hukum alam Aristoteles (Weil, 1986) dan Thomas Aquinas (Losco & William, 2005:77-78). Selain itu, Hobbes sangat mempengaruhi hampir semua pemikir sesudahnya, langsung atau pun tak langsung, membuatnya disejajarkan para pemikir hebat seperti Plato, Aristotle, Machiavelli, Locke, Hegel, Marx dan Mill (Rogers, 2007).

Bagi penulis, hal yang sangat menarik untuk dikaji dari Thomas Hobbes adalah basis antropologis yang dapat ditemukan dalam *Leviathan* yang menjadi dasar kontrak sosial dan seluruh bangun pemikiran politiknya, termasuk tipe dan bentuk pemerintahan yang disarankannya, maupun dampak lanjutannya pada politik modern.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat politik Hobbes sangat kental diwarnai oleh pandangannya tentang manusia, baik sebagai

individu, subyek, warga negara, penguasa yang memegang kedaulatan, atau sebagai apapun manusia yang ada kaitannya dengan politik. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pemikirannya. Sebagai contoh, seperti yang telah disebutkan di atas, seruannya tentang negara yang kuat dalam segala hal dan logika politik yang mendasari doktrin absolutisme didasarkan pada pandangannya bahwa tidak masalah bila para warga hidup dalam ketakutan dan kepatuhan secara paksa sebagai konsekuensi dari seruan tadi. Demikian pula dengan filsafat egaliternya, meski tidak eksplisit dinyatakan dalam *Leviathan*, tentu saja didukung premis tertentu tentang manusia sehingga konsep kesetaraan dalam keadaan alami itu dapat diterima. Gagasan Hobbes tentang "negara alam" yang dianggap sebagai eksperimentasi pemikiran mau tidak mau mendorong pemikiran reflektif tentang model manusia seperti apakah yang ada dalam sebuah negara yang terpisahkan dari tatanan dan pembatasan sosial semacam itu; pilihannya terhadap posisi monarkis sebagai resolusi terhadap ketegangan antara individu dengan komunitas didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah individu yang mementingkan dirinya sendiri maka kekuasaan brutal perlu dijalankan untuk menghadirkan stabilitas dan keamanan bagi kehidupan komunitas; keyakinannya atas "Hukum Alam" dengan rangkaian yang panjang yang begitu diyakininya muncul dari studinya tentang sifat-sifat manusia.

Atas dasar inilah tulisan ini berfokus pada basis psikologis yang dianut Hobbes yang mendasari pemikiran politiknya. Dengan harapan bahwa dengan memahami hal ini, dapatlah pula dipahami asumsi-asumsi yang mendasari seluruh bangun pemikiran politiknya. Bagaimanapun, politik adalah untuk manusia dan dijalankan oleh manusia. Uraian mengenai pandangan manusia dan kajian teoritis tentang hakikat manusia yang dibahas di sini didasarkan pada *Leviathan*. Alasannya bahwa di antara konsep dan tulisan para filsuf politik lainnya, *Leviathan* dari Thomas Hobbes dianggap sebagai kisah tentang tercipta dan diselidikinya hakikat manusia dengan alur yang menarik dan sederhana, dan merupakan karya filsafat politik yang pernah ditulis yang selalu menghantui sekaligus yang pertama dan

terutama (Newey, 2008:1, 35). Pada bagian akhir, saya akan memberikan tanggapan kritis dan uraian sekilas tentang relevansi pemikiran Thomas Hobbes ini dalam situasi kontemporer.

Leviathan: Dari *state of nature* ke terbentuknya persemakmuran dan negara absolut

Titik tolak dari filsafat politik Hobbes adalah kondisi umat manusia dalam keadaan alami. Manusia secara alami adalah setara (Newey, 2008: 51). Alam telah membuat manusia sedemikian setara dengan menganugerahkannya kemampuan fisik dan pikiran yang sama, meskipun terkadang ditemukan ada yang tubuhnya lebih kuat atau cara berpikirnya lebih cepat, namun jika dilihat secara keseluruhan, perbedaan antar manusia tidaklah begitu mencolok (Hoekstra, 2007). Dengan begitu, tidak akan ada orang yang mengklaim dirinya memiliki kelebihan apapun, yang tidak akan dibantah orang lain, sehingga dapat menjanjikan keuntungan yang berarti baginya. Andaikata berkaitan dengan kekuatan fisik, ada orang yang terlemah bukan berarti dia tidak mempunyai kekuatan untuk membunuh yang terkuat. Sebab dengan akalnya, entah dengan tipu muslihat, atau hal-hal lain seperti persekongkolan rahasia atau persekutuan dengan orang-orang lain yang sama bahayanya (Hardiman, 2007:42). Hal ini dimungkinkan karena meski memiliki tubuh yang lemah namun memiliki kemampuan akal yang cukup.

Berkaitan dengan kemampuan akal atau berpikir tadi khususnya tentang ilmu, menurut Hobbes, itu bukanlah kemampuan bawaan dari lahir ataupun didapatkan melainkan karena pengalaman dan setara bagi semua manusia sebagaimana halnya waktu. Hal yang mungkin membuat ada keluarbiasaan dalam kesetaraan adalah kesombongan, di mana hampir semua manusia menganggap dirinya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada manusia lain (Newey, 2008:54). Kondisi ini sudah menjadi sifat manusia. Ini pun menunjukkan bahwa manusia tetap setara karena semua manusia memang berpikiran begitu (Losco & William, 2005:81-82).

Selanjutnya, kondisi kesetaraan tadi mengarah pada munculnya kehilangan

kepercayaan. Nalar yang diajukan Hobbes adalah bahwa dari kesetaraan kemampuan tadi, muncul pula kesetaraan harapan untuk tujuan-tujuan. Dengan begitu, jika ada dua orang yang menginginkan hal yang sama, yang tak dapat dinikmati bersama, mereka menjadi bermusuhan. Karena dalam mencapai tujuan yakni menjaga kelangsungan hidup, bahkan kadang-kadang kepuasan diri, mereka satu sama lain berusaha saling menghancurkan. Dari sinilah muncul ancaman. Kepercayaanpun hilang. Dari kehilangan kepercayaan timbullah pertengkaran. Pertengkaran dijalankan untuk mencapai kejayaan/kemasyhuran. Hobbes menyimpulkan bahwa dalam sifat manusia ada tiga penyebab prinsipil dari pertengkaran yakni: persaingan, pembelaan, dan kemasyhuran. (Losco & William, 2005:81-82) Persaingan membuat orang menginvasi demi mendapatkan sesuatu. Pembelaan untuk mencapai keamanan dan memperebutkan kesejahteraan, dan kemasyhuran demi reputasi

Dalam kondisi inilah terbukti bahwa selama manusia hidup tanpa kekuatan bersama yang menjaga mereka akan tetap patuh, mereka akan berada dalam kondisi perang, perang semua melawan semua. Hasil dari perang adalah ketidaknyamanan, hidup tanpa rasa aman. Dalam perang, istilah adil dan tidak adil dan gagasan tentang benar dan salah tidak mendapat tempat. Di mana tidak ada kekuatan bersama, tidak ada hukum. Di mana tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Kekuatan dan kecurangan di dalam perang justru merupakan keutamaan. Keadilan dan ketidakadilan bukan kemampuan tubuh maupun pikiran, karena tidak terdapat pada manusia yang sendirian di dunia ini. Keadilan adalah kualitas yang menghubungkan manusia dalam masyarakat. Konsekuensinya, tidak ada kepatutan, kekuasaan, perbedaan milik saya dengan milik mereka, melainkan milik setiap orang yang bisa didapatkan dan selama ia bisa menjaganya. Itulah parahnya kondisi manusia yang ditempatkan alam. Sebagian karena hasrat, sebagian karena akal (Losco & William, 2005:85).

Hobbes selanjutnya menyebutkan bahwa ketakutan terhadap kematian, yang merupakan hasrat yang dibutuhkan bagi kehidupan yang nyaman dan sebuah harapan lewat ketekunan

untuk mencapainya merupakan hasrat yang mendorong manusia untuk mengarah menuju perdamaian (Weil, 1986; Losco & William, 2005:85; Hardiman, 2007:42).

Pikiran manusia menghasilkan pasal-pasal kedamaian yang menenteramkan, yang dengannya manusia dapat ditarik untuk mencapai kesepakatan (aturan umum akal budi). Pasal-pasal inilah yang dianggap sebagai hukum-hukum alam (Losco & William, 2005:85). Secara alami manusia memiliki hak pada segala sesuatunya. Itulah yang disebut hak alami (*natural right law of nature*) yakni kebebasan yang dimiliki manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sekehendaknya untuk kelangsungan dirinya sendiri. Sedangkan kebebasan diartikan sebagai ketiadaan segala kendala eksternal (Hardiman, 2007:43; Losco & William, 2005:85). Manusia dalam kondisi perang diperintah oleh akalnya sendiri. Itulah satu-satunya yang bisa digunakan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam kondisi ini tiap manusia memiliki hak atas segala sesuatunya, termasuk atas tubuh orang lain. Maka, selama hak alami tiap manusia atas segala sesuatu itu berlangsung, tidak mungkin ada keamanan bagi manusia manapun, betapapun kuat dan bijaksananya ia menjalani hidup yang dibiarkan alam ini. Konsekuensinya, tiap manusia perlu mencari perdamaian, selama masih ada harapan untuk itu. Dan bila tidak dapat meraihnya ia boleh mencoba dan menggunakan seluruh bantuan dan keuntungan-keuntungan perang. Kalimat pertama tadi adalah hukum alam yang pertama dan kalimat kedua adalah gabungan dari hak-hak alami yakni dengan segala cara boleh membela diri sendiri (Hardiman, 2007:43)

Hukum alam kedua yang berbunyi bahwa segera setelah ketenteraman dan keselamatan hidupnya terjamin, setiap orang harus melepaskan haknya atas segala sesuatu, tentu saja dengan syarat tiap orang lainnya juga melakukan hal yang sama-dan puas dengan perdamaian yang tercipta yang disepakati dengan orang-orang lain. Hukum alam kedua ini merupakan implikasi logis dari hukum pertama. Pelepasan hak bisa dilakukan dengan menanggalkan hak itu tanpa memberikan pada orang lain atau mengalihkan hak itu kepada orang lain (Losco & William, 2005:87). Kapanpun seseorang menyerahkan haknya atau

menanggalkan hal itu merupakan tindakan sukarela dengan mempertimbangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Tidak semua hak dapat diasingkan. Hak atas kehidupan, hak membela diri dan motif atau tujuan pelepasan hak itu atau pemeliharaan diri. (Losco & William, 2005:87)

Penyerahan hak secara bersama disebut kontrak. Pengertian yang lebih jelasnya adalah pengalihan hak secara timbal balik. Bila aturan kontrak tidak dipenuhi, *state of nature* akan muncul lagi. Daya ikat kontrak ini tergantung pada rasa takut akan pengingkaran kontrak, yang pada akhirnya dapat dikembalikan pada rasa takut akan kematian (Hardiman, 2007:43). Hukum alam yang ketiga berbunyi bahwa manusia harus melaksanakan perjanjian (kontrak) yang mereka buat. Tanpa ini, kontrak menjadi sia-sia dan hak tiap orang atas segala sesuatu tetap ada sehingga tetap dalam kondisi perang. Hukum ketiga ini menyangkut keadilan. Ketidakadilan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian.

Hukum alam keempat hingga kesembilan belas berisikan aturan-aturan yang menopang kelestarian kontrak meski tuntutananya tidak niscaya namun harus dipenuhi untuk memelihara dan meneguhkan kontrak agar muncul konflik dan lalu meruntuhkan kontrak

Hukum-hukum alam seperti keadilan, kesetaraan, kerendahan hati, pengampunan, tanpa adanya teror kekuatan tertentu, yang menyebabkan mereka terawasi itu bertentangan dengan dengan hasrat-hasrat alami kita yang membawa kita pada keberpihakan, kesombongan, balas dendam dan lain sebagainya. Meskipun hukum alam ini dijaga setiap orang sebaik-baiknya, jikaditidak ada kekuatan yang diteguhkan atau tidak cukup besar untuk keamanan maka akan jatuh pada keadaan perang lagi (Losco & William, 2005:87). Maka diperlukan kekuasaan publik yang dapat melindungi manusia dari musuh internal dan eksternal. Untuk itu setiap orang mesti mengalihkan segala kekuasaan dan kekuatannya kepada seorang atau beberapa orang lain dan dengan jalan itu kehendak semua orang dipersatukan pada satu titik sehingga manusia yang satu ini atau masyarakat ini menjadi satu-satunya wakil dari setiap orang dan setiap orang menganggap tindakan-tindakan wakil itu, seakan-akan dia sendirilah yang melakukannya

(Hardiman, 2007:43). Inilah yang disebut sebagai persemakmuran (Bahasa Latin: *civitas*) (Losco & William, 2005:98). Ringkasnya, perjanjian antar manusia memulai proses pendirian sebuah persemakmuran. Lebih khusus, sebuah persemakmuran yang dilembagakan sebab walau semua dituntut menghormati perjanjian, masih tetap perlu menempatkan seseorang dalam kekuasaan untuk menegakkan perjanjian. Orang ini disebut "penguasa" dan dibangun oleh perjanjian antar orang persemakmuran. Perjanjian membangun peran penguasa sebagai penegak semua perjanjian dan hukum sipil yang ada, dan sebagai hakim terhadap mereka yang melanggarnya.

Selanjutnya, Hobbes mengatakan bahwa karena para subyek memberi pada penguasa kekuasaannya, penguasa tak dapat melakukan kesalahan terhadap subyek (tak dapat dipersalahkan). Penguasa berada di atas hukum dan berkuasa secara absolut (Losco & William, 2005:103). Inilah konsekuensi dari persemakmuran yang dilembagakan di mana negara absolut (dan dengan demikian penguasa absolut) menjadi subyek kedaulatan (Hardiman, 2007:45). Inilah yang dinamakan *Leviathan*. Istilah *leviathan* diambil Hobbes dari nama seekor monster laut yang buas atau buaya, yang diambil Hobbes dari Alkitab (Bible) khususnya kitab Yesaya dan Job. Russell (2002:724) menyebutnya sebagai dewa yang besar sekali. Hobbes menggunakan istilah ini untuk menggambarkan penguasa yang kuat, mutlak serta ditakuti oleh rakyatnya sehingga akan tercipta keamanan dan ketertiban. (Newey, 2008:23)

BAHASAN

Cerita kontrak sosial bermula dalam suatu waktu dengan kekacauan (*chaos*) dan kematian dan melalui sebuah perjalanan perkembangan manusia mencapai puncaknya dalam pembentukan masyarakat yang berkelanjutan dan rasional-yakni persemakmuran-yang dipimpin seorang penguasa. Penalaran Hobbes tentang transformasi dari keadaan alami (*state of nature*) ke persemakmuran dalam *Leviathan* tidak dimulai dengan definisi atau deskripsi yang eksplisit perihal keadaan alami, tapi justru dengan

pembahasan tentang hakikat manusia (Hardiman, 2007:40; Losco & William, 2005:78-81). Dia banyak menjelaskan tentang pemikiran manusia. Dia bergerak maju melalui penalaran dan sains, dan diskusi terbuka mengenai "gairah" (*passion*) manusia (Losco & William, 2005:78-81). Gairah ini mengarah pada "kerja keras."

Hobbes mengungkapkan daya fundamental yang mendorong manusia, yang disebut hasrat (*desire*). Manusia berhasrat lalu mengejar makanan, tempat berlindung, dan kenikmatan indera, dan manusia memiliki ketidaksukaan dan menghindari rasa sakit, dingin, dan bahaya. Semua itu membuat kekacauan dalam kehidupan sehari-hari dalam alam. Semua menjelaskan mengapa manusia membunuh satu sama lain demi makanan dan tempat berlindung (Losco & William, 2005:78-81).

Konsep hasrat menjadi semacam batu loncatan bagi Hobbes antara pengamatan dasarnya mengenai manusia, dan definisinya tentang hakikat manusia dan hukum alami. Hobbes membuat klaim (pendakuan) bahwa di antara hasrat manusia yang abadi dan paling membara adalah kekuasaan (Losco & William, 2005:79). Hasrat akan kekuasaan didasarkan pada gairah sederhana, namun fondasinya dibangun dalam menghindarkan ketidaksukaan utama manusia yaitu kematian, dan pemenuhan hasrat utama manusia, yaitu bertahan hidup (*survival*). Ini mendasari hukum alami yang ditemukan melalui nalar, di mana manusia dilarang melakukan hal yang destruktif dalam hidupnya. Hobbes tampaknya telah meletakkan basis bagi hakikat manusia yakni bahwa setiap tindakan manusia, sadar ataupun tak sadar, dimaksudkan untuk *survival*.

Kemampuan manusia dalam pemikiran, bicara, hasrat dan ketidaksukaannya membawa manusia dari irasional ke rasional. Manusia tahu bahwa dia harus *survive*, dan bahwa dia didorong melakukan itu karena ketakutannya yang tiada akhir terhadap kematian. Pikiran rasional manusia mencari cara untuk memastikan perdamaian, dan dari pencarian ini persemakmuran akan lahir.

Dari hukum alam yang fundamental ini, di mana manusia diperintahkan untuk mengupayakan perdamaian, diturunkan hukum kedua. Karena pencarian manusia akan

perdamaian (hukum alami yang pertama), dia berkehendak menyerahkan banyak haknya sebagai bagian dari kontrak dengan orang lain (hukum alam kedua) untuk menjamin perdamaian tersebut. Kontrak itu amat sangat bermakna karena menandai akhir dari keadaan alami dan permulaan persemakmuran. Manusia, yang sebelumnya saling membunuh demi makanan dan tempat berlindung, kini bersepakat menyerahkan haknya untuk membunuh dan mencuri, dan setuju mengatasi ketakutan mereka akan kematian. Transisi ini menjadi problematik karena demi perjanjian pertama yang dibuat, seseorang harus mengorbankan rasa amannya

Keberatan terpenting terhadap argumen Hobbes dalam *Leviathan* muncul di sini. Pandangan Hobbes bahwa karena para subyek memberi pada penguasa kekuasaannya, penguasa tak dapat dipersalahkan, jelas bahwa penguasa ada di atas hukum. Kekuasaan bisa jadi sangat tidak terkendali karena absolutisme. Lalu, bagaimana persemakmuran dapat menjamin perdamaian jika pemimpin memiliki kekuasaan tak terkendali semacam itu? Hobbes membuat argumen bahwa *seseorang* mesti ada di puncak, di mana pasti ada ujungnya kekuasaan. Bagi Hobbes mustahil membagi kekuasaan dalam persemakmuran, karena dengan begitu sama saja dengan berupaya untuk membubarkannya. Jelaslah bagi Hobbes bahwa penguasa tunggal harus memiliki kekuasaan absolut. Dapatkah disimpulkan bahwa bagi Hobbes, demokrasi -sistem *check-and-balance*-tidak menyelesaikan masalah

Dalam upaya menunjukkan bahwa penguasa absolut tidak harus menjadi korup dan tiran, Hobbes berargumen yang meyakinkan bahwa minat terbaik penguasa adalah untuk mencegah praktek-praktek semacam itu (Russell, 2002:724-725). Setelah 'memuja' penguasa dalam *Leviathan*, Hobbes membuat peralihan yang menarik dan membawa penguasa turun kembali ke level warga. Tanpa persemakmuran, penguasa hanyalah seorang manusia biasa (seorang manusia yang dijadikan penguasa oleh orang-orang), dan jika persemakmuran hancur dan warganya kembali ke keadaan alami, maka dia pun akan ikut dengan mereka. Dalam dunia persemakmuran yang diperintah oleh penguasa, dia tak akan lari kemana-mana karena tak ada aristokrasi yang

melindunginya. Barangkali Hobbes menyadari bahwa mungkin ada tiran yang sangat baik dan korup dalam persemakmuran mana pun, sebagaimana sejarah membuktikannya, namun umumnya dia yakin bahwa meskipun penguasa itu tak tersentuh (*untouchable*), sekali dia sudah terbentuk, orang-oranglah yang awalnya membentuknya. Lagipula, layak untuk percaya bahwa sebelum para anggota persemakmuran memberi kekuasaan absolut mereka sendiri kepada yang lain, mereka akan memastikan dahulu bahwa penerimanya berkarakter kuat. Jika hal ini tetap tak diperoleh dan raja (penguasa) bersifat despotik, bagi Hobbes, despotisme masih tetap lebih baik daripada anarki (Russell, 2002:724)

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa semua tindakan manusia-penguasa atau warga-dapat diramalkan oleh gairah yang sama yang diatur oleh keadaan alami. Di atas segalanya, manusia takut akan kematian dan mencari perdamaian. Dalam membuat suatu perjanjian dan melembagakan kekuasaan, manusia menyerahkan hak-hak yang dimiliki dalam keadaan alami, sebagaimana hak untuk hidup tanpa tirani. Namun bagi Hobbes, pengorbanan tersebut ditutupi oleh apa yang diperoleh melalui hidup di bawah penguasa yang sungguh-sungguh absolut. Seorang penguasa, entah korup atau jujur, harus menjamin tatanan dan mencegah kekacauan dan kematian. Itulah alasan kontrak sosial awalnya dibangun dan dengan demikian sepenuhnya menjustifikasi penciptaan pemerintahan absolut. Thomas Hobbes, yang menulis *Leviathan* selama Perang Sipil Inggris melihat dari jendela begitu banyak kekacauan dan memutuskan bahwa *survival* itu harus dikejar bagaimanapun caranya dan sebesar apapun pengorbanannya (Newey, 2008: 8-13).

Tanggapan kritis dan relevansi

Secara umum, berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa metode Hobbes dalam *Leviathan* adalah menjelaskan prinsip-prinsip tindakan manusia, lebih jauh memperhitungkan motivasi manusia dan mengarah kepada teori

tentang bagaimana mengorganisir masyarakat manusia. Hobbes telah memberikan pendasarannya psikologis yang kuat terhadap perilaku politik dan bagi terbentuknya negara yang kuat. Meski demikian, teori kontrak sosial yang termuat dalam *Leviathan* dengan basis antropologis dan psikologi politik yang dianut Hobbes ini tampaknya perlu dikritisi. Ada beberapa hal dari pemikiran politik ini yang patut mendapat perhatian serius.

Pertama adalah pandangan Hobbes bahwa manusia itu mementingkan diri sendiri secara alami karena didasarkan pada egoisme psikologis (Newey, 2008:54). Tentu, dengan rendah hati dan penuh kejujuran tentu saja kita dapat menerima bahwa tidak sedikit orang yang memang memiliki tendensi dan perilaku nyata semacam itu. Tapi bukan berarti kita lalu menutup mata pada kenyataan bahwa sesungguhnya manusia juga memiliki minat transenden (melampaui diri) yang berfokus pada aspek sosial, religius atau politik. Aliran/mazhab psikologi humanistik berkeyakinan sepenuhnya bahwa manusia memiliki kualitas luhur, mulia, mencapai kesempurnaan, dan berorientasi sosial kemasyarakatan. Pandangan yang optimis dan penuh harapan tentang manusia bukanlah sesuatu yang utopis, terutama dengan popularitas psikologi positif saat ini yang mengkaji dan menerapkan segi-segi positif manusia untuk perkembangan optimal fungsi psikis dan kesejahteraan manusia.

Kedua, definisi Hobbes tentang kebebasan sebagai "ketiadaan hambatan eksternal" terhadap gerakan, energi, dan kuasa manusia juga menarik untuk dipersoalkan. Hobbes mengaitkan kebebasan dengan kehendak dengan menyatakan bahwa seorang pribadi yang bebas tidak memiliki rintangan, tak ada halangan, tidak ada penghentian terhadap apa yang dimiliki "kehendak, hasrat atau kemauan" untuk dilakukan. Tampaknya Hobbes menganggap kebebasan jasmani (fisik/tubuh) identik dengan kebebasan politis. Padahal kebebasan jasmani sepenuhnya tidak sama dengan kebebasan subyek di bawah pemerintahan. Subyek dibatasi oleh "rantai artifisial" yang disebut hukum sipil di mana subyek mengikatkan dirinya pada perintah penguasa. Bukankah mungkin saja terjadi bahwa individu secara fisik bebas namun secara psikis

dan ideologis sangat terikat oleh karena kuatnya cengkeraman penguasa terhadap kebebasan warganya? Selain itu, konsep kebebasan yang dianut Hobbes ini adalah kebebasan negatif (*freedom of*), yakni keadaan terlepas dari hambatan, bukan kebebasan positif (*freedom for*) yakni kebebasan melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang kita kenal sebagai kebebasan eksistensi.

Ketiga, satu pertanyaan yang mungkin agak bergeser dari topik utama tulisan ini namun masih relevan adalah: apakah sungguh-sungguh ada keadaan alami (*state of nature*) itu? Kalau kita mau sedikit memikirkan lebih jauh dan mendalam maka jawaban yang tepat tampaknya adalah tidak ada. Jauh lebih lama daripada adanya manusia/orang-orang (misalnya homo sapiens), sebelumnya sudah ada masyarakat. Orang-orang selalu berada/eksis dalam suatu konteks sosial. Maka, premis Hobbes yang menyatakan bahwa manusia itu tidak secara alami sosial dan sebuah masyarakat tidak ada kecuali melalui kekuatan negara, tentu tidak usah diterima begitu saja.

Agaknya, banyak yang mencirikannya sebagai seseorang yang teramat pesimis. Pandangan-pandangannya atas keadaan alami dengan segala deskripsi tentang sifat manusia yang mendasari pemikiran politiknya memang tampak buram, buruk, dan bahkan terkesan jahat (antropologi negatif). Salah satu kritikan keras yang sering dialamatkan kepada Hobbes terkait hal ini dan dampaknya kehidupan kenegaraan adalah bahwa Hobbes tak menyediakan teori sebagai dasar untuk menggulingkan rezim yang menindas (opresif). Tentu kritik ini tak adil sebab sama saja meminta dibuatkannya sebuah konstitusi pada saat perang saudara berkecamuk. Tentu tak ada konstitusi yang berdaya saat perang sipil (perang saudara) maka yang diperlukan penanganan fisik untuk mengakhiri perang tersebut, dan, agar tidak terjebak pada penilaian yang buruk tentang Hobbes, barangkali akan lebih objektif bila senantiasa diingat bahwa periode di mana ia hidup (datangnya revolusi industri dengan segala dampak yang dibawa serta) merupakan masa tak damai dan sama sekali tidak nyaman (Newey, 2008:8-13)

Hobbes masih relevan hingga saat ini disebabkan pendekatan yang dipilihnya terhadap

tujuan pemerintahan berdasarkan atas sebuah "skenario kasus terburuk". Tentu sulit mengabaikan begitu saja konklusi Hobbes bila diperhatikan masyarakat demokratis Barat yang cenderung liberal saat ini dan membandingkannya dengan negara-negara yang masih jauh dari demokratis namun melalui penciptaan tatanan sipil dan menjaga dengan baik hak-hak sipil serta pluralisme tercipta sebuah masyarakat yang stabil di mana orang-orang akan menikmati pangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, di mana rasa aman kadangkala sulit diperoleh. Artinya, tak mustahil sebuah negara yang begitu kuat perannya (otoritarian) dapat diterima oleh masyarakat sejauh ketahanan pangan diperoleh dan rasa aman tercipta dibandingkan dengan negara demokratis namun tak menjamin kebutuhan tersebut.

Hobbes, dengan begitu, tak layak diabaikan, meski bagi orang yang amat peduli soal kebebasan Hobbes sama sekali tak menyenangkan dan tak memuaskan khususnya karena tampaknya tak ada mekanisme bersepakat dengan Yang berdaulat (penerima kedaulatan/penguasa) yang tak kompeten atau tak memiliki kehendak memenuhi kewajibannya terhadap subyek (pemegang) kedaulatan yakni menjaga tatanan dan perdamaian. Untuk itu, menarik untuk disimak pernyataan Bertrand Russel bahwa "lingkungan kehidupan manusia banyak menentukan filsafatnya, tetapi sebaliknya, filsafat mereka juga banyak menentukan lingkungan kehidupannya." (Russel, 2002)

Pemikiran politik Hobbes tentang kontrak sosial dengan basis antropologis dan psikologi politik yang diyakininya amat berguna, bagaimanapun, karena orang-orang seringkali harus membentuk masyarakat baru: usaha yang baru, negara, atau klub. Lebih dari pada itu, kontrak sosial Hobbes memberikan sebuah paradigma untuk dapat menganalisis masyarakat masa kini. Kita tak dapat mengatakan bahwa masyarakat kita dibangun secara rasional atau layak jika kita tak memasukinya dari hipotetis keadaan alami termasuk kondisi buruk yang sangat mungkin terjadi semacam kerusakan, konflik sosial, dan perang.

Implikasi pandangan Hobbes tentang

keadaan alami ini menemukan relevansinya dalam teori masa kini tentang konflik misalnya dilema sosial yang dijelaskan melalui teori permainan (*game theory*) misalnya dilema narapidana (*prisoner dilemma*) yang amat terkenal dalam kajian psikologi sosial khususnya psikologi politik (a.l Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2004:89-90; Newey, 2008:99-100) untuk menjelaskan konflik sosial, konflik kelompok yang diakibatkan oleh persaingan yang sangat sengit disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, sebagaimana akhir-akhir banyak terjadi di dalam negeri maupun dunia.

Dalam konteks hubungan internasional, pemikiran politik Hobbes ini mendapatkan kontekstualisasinya khususnya keberadaan lembaga-lembaga internasional semacam Perserikatan Bangsa-bangsa, Amnesty Internasional, Pertemuan G-8, Uni Eropa dan lainnya haruslah dipahami dalam kerangka tegangan antara kedaulatan negara-negara dan kemungkinan perang sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk mengatasi dilema keamanan (Cottam, Dietz-Uhler, Mastors, & Preston, 2004:257-274). Bagaimanapun, politik internasional merupakan keadaan alami sebagaimana dimaksudkan oleh Hobbes (Newey, 2008:160-162). Karenanya, kontrak sosial tentu saja sangat esensial untuk mengevaluasi masyarakat kita dan mengeksplorasi bagaimana masyarakat itu seharusnya diubah.

PUSTAKA ACUAN

- Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2004). *Introduction to political psychology*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Hardiman, F.B. (2007) *Filsafat politik, membangun pemikiran politis melalui interpretasi karya-karya klasik*. Manuskrip khusus untuk STF Driyarakara, Jakarta
- Hoekstra, K. (2007). Hobbes on the natural condition of mankind, dalam Springborg, P. (ed) *The cambridge companion to hobbes's leviathan*. New York: Cambridge University Press
- Losco, J. & William, L. (2005) *Political theory, kajian klasik dan kontemporer* Vol. II (Alih bahasa: Harris Munandar), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Newey, G. (2008). *Routledge Philosophy GuideBook to Hobbes and Leviathan*. London & New York: Routledge**
- Rogers, G.A.J. (2007). Hobbes and his contemporaries, dalam Springborg, P. (ed) *The cambridge companion to Hobbes's leviathan*. New York: Cambridge University Press
- Russel, B. (2002) *Sejarah filsafat barat* (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shaphiro, David. (1998) *Selected philosophy topics that arise frequently in Lincoln-Douglas debate*. Ditemukan kembali dari www.uvm.edu/debate/NFL/rostrumlib/ShapiroMar98.pdf
- Weil, F.D. (1986). The stranger, prudence, and trust in Hobbes's theory. *Theory and Society*, Vol. 15, No. 5, Sep, 759-788